

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini karena literasi keuangan dan inklusi keuangan mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia maka akan mengakibatkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat (OJK, 2017).

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami keuangan. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dengan berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh OJK pada tahun 2016 yang menunjukkan indeks literasi keuangan di Indonesia hanya sebesar 29,66% (OJK, 2016). Penelitian dari Bongomin et.al (2016) menerangkan pada penelitiannya bahwa literasi keuangan yang rendah banyak terjadi di kalangan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih gencar untuk melakukan upaya agar literasi keuangan masyarakat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

OJK menjelaskan bahwa literasi keuangan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, diantaranya seperti masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki

kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, serta terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Menurut OJK masyarakat harus dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan baik manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban, serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan. Lembaga keuangan serta masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dua hal tersebut saling membutuhkan antar satu sama lain. Semakin tinggi literasi keuangan masyarakat maka semakin besar kemungkinan masyarakat akan menggunakan dan memanfaatkan produk dan layanan dari lembaga keuangan yang sudah ada.

Literasi keuangan masyarakat akan diikuti dengan inklusi keuangan masyarakatnya (OJK, 2017). Inklusi keuangan telah menjadi agenda penting di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat internasional inklusi keuangan telah dibahas diberbagai forum ekonomi internasional dimana Indonesia turut berpartisipasi aktif didalamnya. Hal ini dipicu dari hasil survei Bank Dunia (2010) yang menunjukkan bahwa hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.

Inklusi keuangan menurut OJK merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 memperlihatkan bahwa indeks inklusi keuangan di Indonesia

sebesar 67,82% (OJK, 2017). Indeks tersebut meningkat dibandingkan dengan hasil survei Bank Dunia tahun 2010 dan Hasil Survei Nasional Literasi dan Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada tahun 2013 lalu yang memiliki indeks sebesar 59,74%. Walaupun diangka indeks bisa dikatakan cukup baik namun pada kenyataannya hanya terjadi sebagian besar di provinsi-provinsi dan kota besar saja. Oleh karena itu hal ini merupakan tugas pemerintah agar inklusi keuangan pada masyarakat menjadi baik secara keseluruhan, pemerintah dapat melakukan strategi inklusi keuangan yang berbeda-beda pada tiap daerah agar inklusi keuangan menjadi baik secara merata.

Pentingnya literasi keuangan dan inklusi keuangan juga dibahas dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD (2013) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen telah diakui sebagai terjalannya kesinambungan dalam mengejar stabilitas keuangan. Setiap jenis stabilitas baik pertumbuhan keuangan inklusif, ekonomi, politik, atau sosial merupakan prasyarat penting. Kesadaran akan produk yang tersedia dalam suatu Negara merupakan prasyarat penting individu dan pengusaha untuk mengambil keuntungan dari jasa keuangan yang tersedia juga bergantung pada pendidikan keuangan yang memadai. Pendidikan terhadap pengetahuan akan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidakseimbangan dan membantu masyarakat menerima dan menggunakan produk yang mana dapat meningkatkan aksesibilitas mereka.

Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh OJK pada tahun 2016 masyarakat Indonesia 96,81% mengaku memiliki tujuan

keuangan, namun sayangnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk menggunakan uang masih didominasi dengan tujuan jangka pendek untuk memenuhi kehidupan sehari – hari dan mempertahankan hidup. Dari hasil SNLIK tahun 2016 tersebut didapatkan bahwa masyarakat menggunakan uang sebesar 49,11% untuk memenuhi kehidupan sehari – hari, 17,68% untuk bertahan hidup dan 8.00% untuk biaya pendidikan anak (OJK, 2017). Oleh sebab itu maka sikap masyarakat terhadap uang juga merupakan suatu hal yang penting untuk mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Money attitude atau sikap terhadap uang merupakan kecenderungan sikap yang bersifat positif atau negatif terhadap uang (Shohib, 2015). Sikap terhadap uang dapat mempengaruhi aspek dalam hidup yaitu kebiasaan pembelian, ideologi politik, pemberian penghargaan, dan sikap mengenai lingkungan dimana beberapa area penting didalamnya sikap terhadap uang memiliki perannya (Robert dan Sapulveda, 2008). Maka dari itu pemerintah juga diharapkan dapat memberikan edukasi ke masyarakat terhadap bagaimana perilaku terhadap uang atau *money attitude* agar menciptakan inklusi keuangan yang baik dan perekonomian menjadi lebih baik.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, serta *money attitude* agar menjadi lebih baik. Diantaranya yaitu telah dilakukan melalui pendekatan strategi nasional yang mencakup tiga aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, *responsible finance* melalui pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen (BI, 2016). Upaya – upaya tersebut antara lain program

Laku Pandai yaitu Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang mempunyai tujuan menyediakan produk – produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan, selanjutnya program simpel yaitu Simpanan Pelajar, Program SiPINTAR adalah layanan keuangan terpadu yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk dua atau lebih produk lembaga keuangan, dengan proses mudah dan terjangkau, dan program edukasi literasi keuangan (OJK, 2015). OJK juga menjalankan program yang bernama Sikapiuangmu yang bertujuan agar masyarakat Indonesia memiliki *money attitude* yang baik dalam penggunaan maupun pengelolaan uang dalam berinvestasi.

Dari implementasi awal strategi yang dijalankan OJK cenderung mengandalkan pada lembaga keuangan dalam kerjasama pelaksanaan program-program untuk meningkatkan Inklusi keuangan dan literasi keuangan, dilansir dari Tribunnews.com (2014). Berdasarkan hasil survei OJK sektor Perbankan dan lembaga keuangan memegang memiliki peran dominan untuk tingkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Namun program – program tersebut masih belum bisa disebut memberi dampak signifikan terhadap Inklusi keuangan Indonesia. Dilihat dari hasil survei SNLIK tahun 2016 Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang memiliki indeks inklusi keuangan masing – masingnya sebesar 81%, dan 96% sementara itu Indonesia hanya sebesar 67,8%. Sedangkan untuk literasi keuangan berdasarkan hasil SNLIK yang dilakukan OJK tahun 2016 Indonesia memiliki indeks sebesar 29,7%, sementara negara tetangga Malaysia dan Singapura memiliki

indeks sebesar 65%, dan 98%. Hal ini menjadi perhatian serius bagi OJK untuk dapat memperluas kerjasama dan menggandeng banyak pihak untuk meningkatkan literasi keuangan, *money attitude* dan inklusi keuangan dengan salah satu caranya yaitu menggunakan modal sosial.

Modal sosial menurut Francis (2002) merupakan seseorang atau kelompok yang merasa simpatik, perhatian, peduli, empati, rasa hormat, rasa kewajiban, atau kepercayaan terhadap orang atau kelompok lain. Modal sosial dapat berperan penting dalam peningkatan inklusi keuangan serta berperan penting dalam *intervening* dan meningkatkan sumber daya termasuk pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai *driver* dari literasi keuangan (Bongomin et.al 2016). Lebih lanjutnya penelitian Kamukama dan Natamba (2013) menyatakan bahwa modal sosial secara parsial juga menengahi hubungan *intervening* sosial dan akses ke layanan keuangan. Beberapa contoh dari modal sosial pada masyarakat yaitu seperti, kelompok arisan, kelompok antar tetangga, kelompok ibu - ibu majelis ta'lim, dan lain – lain.

Di Indonesia modal sosial merupakan modal dasar yang dibutuhkan agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan dibangun melalui tiga unsur yaitu kepercayaan (*trust*), jejaring (*networking*), dan norma (*norm*). Salah satu contoh peran penting modal sosial dalam masyarakat yaitu untuk meningkatkan inklusi keuangan agar terciptanya pertumbuhan ekonomi secara inklusif Bappenas (2016). Modal sosial dapat mempengaruhi hasil pendidikan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keuangan sehingga seseorang dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dalam pengelolaan keuangan yang

bermuara pada pembangunan ekonomi suatu negara. Hasil penelitian (Bongomin et al., 2016) menyatakan bahwa program literasi keuangan dapat dilakukan secara non formal dengan membentuk komunitas – komunitas literasi, agen kooperatif, komunitas mahasiswa ataupun komunitas masyarakat. Pengelola kelompok harus menyadari bahwa pembelajaran dapat memanfaatkan lingkungan sosial, sehingga dapat saling belajar satu sama lain.

OJK menargetkan inklusi keuangan yang merata di Indonesia lebih khususnya yaitu pada daerah – daerah yang masih tertinggal secara ekonominya. Kabupaten Sijunjung yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang termasuk daerah tertinggal di Indonesia dilansir Kompas (2013). Indeks Inklusi Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat berada juga berada dibawah garis rata – rata nasional. Hasil survei SNLIK yang dilakukan OJK tahun 2016 memperlihatkan indeks hasil rata - rata nasional inklusi keuangan Indonesia sebesar 67,8% sedangkan Sumatera Barat memiliki nilai sebesar 66,9%. Masyarakat pedesaan masih memegang ikatan kuat diantara warganya, agar menciptakan hubungan yang harmonis. Modal sosial dapat digunakan untuk segala kepentingan dengan dukungan sumberdaya fisik dan pengetahuan budaya yang dimiliki, begitu sebaliknya. Secara sadar maupun tidak sadar modal sosial sering dipakai oleh masyarakat antar rumah tangga di Kabupaten Sijunjung dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Berdasarkan survei Bank Dunia (2010) juga menunjukkan bahwa hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.

Penelitian terdahulu ada yang membahas tentang inklusi keuangan terhadap komunitas kaum muda di Indonesia dengan variabel *intervening* modal sosial (Saputra & Dewi, 2017), kemudian juga ada yang membahas literasi keuangan terhadap inklusi keuangan dengan modal sosial sebagai mediator di daerah pedesaan Negara Uganda (Bongomin et al., 2016) yang memperlihatkan hubungan antar variabelnya, selain itu ada juga yang membahas tentang money attitude terhadap penggunaan layanan kartu kredit di Australia (Phau & Woo, 2008), selanjutnya juga ada yang membahas bagaimana akses keuangan yaitu inklusi keuangan dan literasi keuangan (Sukumaran, 2015), selain itu juga ada penelitian tentang modal sosial dan *money attitude* (Tatarko & Schmidt, 2013). Namun masih jarang yang meneliti tentang bagaimana literasi keuangan, dan *money attitude* mempengaruhi inklusi keuangan dengan modal sosial sebagai *interveningnya* pada pelaku rumah tangga di daerah yang masih tertinggal khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mempunyai judul **“Peran Literasi Keuangan dan Money Attitude Terhadap Inklusi Keuangan Dengan Modal Sosial Sebagai Variabel Intervening Pada Rumah Tangga Di Nagari Unggan Kabupaten Sijunjung”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap modal sosial pada pelaku rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sinjunjung Sumatera Barat?

2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan dengan modal sosial sebagai variabel *intervening* pada pelaku rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sinjunjung Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh *money attitude* terhadap modal sosial pada pelaku rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sinjunjung Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh *money attitude* terhadap inklusi keuangan dengan modal sosial sebagai variabel *intervening* pada pelaku rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sinjunjung Sumatera Barat?
5. Bagaimana pengaruh modal sosial terhadap inklusi keuangan pada pelaku rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sinjunjung Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh literasi keuangan terhadap modal sosial pada pelaku rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sinjunjung Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan dengan modal sosial sebagai variabel *intervening* pada pelaku rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sinjunjung Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh *money attitude* terhadap modal sosial pada pelaku rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sinjunjung Sumatera Barat.

4. Untuk menganalisis pengaruh *money attitude* terhadap inklusi keuangan dengan modal sosial sebagai variabel *intervening* pada pelaku rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.
5. Untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap inklusi keuangan pada pelaku rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi acuan pada penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang terkait dengan literasi keuangan, *money attitude* terhadap inklusi keuangan dengan modal sosial variabel *intervening* pada rumah tangga di Nagari Unggan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai masukan pada pemerintah dalam membuat kebijakan terkait literasi keuangan, *money attitude*, dan inklusi keuangan yang dapat diterapkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial.

3. Manfaat Bagi Pelaku Rumah Tangga

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang sudah berumah tangga akan pentingnya literasi keuangan, *money attitude*, dan inklusi keuangan dengan menggunakan modal sosial.

4. Manfaat Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga keuangan yang sudah ada dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap produk – produk dari lembaga keuangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pelaku rumah tangga yang berlokasi di Nagari Unggan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan hanya membahas variabel literasi keuangan, *money attitude*, serta inklusi keuangan, dengan variabel modal sosial sebagai variabel *intervening*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika dari penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bagian yang berisi tentang penjelasan literatur penelitian yang berkaitan dengan teori yang dibahas pada penelitian ini. Bagian ini juga menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, penjelasan variabel penelitian, analisa data, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pengolahan data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memberikan paparan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam bentuk olahan data sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, serta terdapat intepretasi hasil yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan dari bab – bab sebelumnya dan saran untuk penelitian yang akan datang.

